



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI DESA DUTOHE KECAMATAN KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO

Siti Rahmawati Lakadjo¹, Rusli Isa², Romy Tantu³

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

e-mail: rahmalakadjo@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and describe the implementation of policies and the factors that determine the implementation of the Family Planning Village Program Policy. This research uses a qualitative approach with qualitative descriptive analysis. Data collection techniques are literature research and field studies (observations, interviews, and documentation). The results show that the implementation of the Family Planing (KB) Village Program Policy in Dutohe Village has generally been carried out well. However, some obstacles such as inadequate facilities and infrastructure, the quality of human resources for extension workers, and village family planning cadres need to be improved and regenerated. Viewed from the factors that determine the implementation of the KB Village Program Policy, compliance with the rules/guidelines has been well implemented by the apparatus, but the impact of the KB village program has not seen any significant changes from this program.

Keywords: Policy implementation, Family Planing (KB) Village

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan dan faktor yang menentukan Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program kampung keluarga berencana (KB) di desa dutohe secara umum telah dilakukan dengan baik, hanya saja masih ada beberapa kendala seperti kurang memadainya sarana dan prasaran, serta kualitas SDM penyuluh maupun kader kampung KB yang perlu di tingkatkan dan diperbaiki. Dilihat dari faktor-faktor yang menentukan Implementasi Kebijakan Program Kampung KB, kepatuhan terhadap aturan/pedoman telah dilaksanakan dengan baik oleh aparatur, tetapi untuk dampak dari program kampung KB sendiri belum terlihat perubahan besar dari program ini.

Kata-kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kampung Keluarga Berencana (KB)

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk. Terkait dengan arah kebijakan pembangunan nasional pemerintah tahun 2015-2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diberi mandat untuk mensukseskan Agenda Pembangunan Nasional (Nawacita), khususnya Agenda Prioritas ke-3 “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam rangka Negara Kesatuan”, Agenda Prioritas ke-5 “ Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”, serta Agenda Prioritas ke-8 “Revolusi Karakter Bangsa” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Menurut *Website* resmi Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Salah satu daerah yang menjadi sasaran Program kampung KB di Kecamatan Kabila adalah

Desa Dutohe. Dengan luas wilayah 18.55 km², jumlah penduduk Desa Dutohe berdasarkan profil Desa tahun 2016 sejumlah 1.180 jiwa yang terdiri dari 575 laki-laki dan 605 perempuan. Program Kampung KB di Desa Dutohe dibentuk pada tahun 2017. Sejauh ini telah melaksanakan bermacam-macam program yang dicanangkan oleh BKKBN sesuai dengan tugas dari program kampung KB untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta terdapat kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R).

Berdasarkan hasil peneliti bahwa implementasi kebijakan program kampung keluarga berencana (KB) di desa dutohe secara umum telah dilakukan dengan baik, hanya saja masih ada beberapa kendala. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kualitas SDM kelompok kegiatan kader sehingga menurunnya kinerja kelompok. Kurang memadainya sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan program, terutama rumah dataku. Keterbatasan Dana. Dengan kurangnya dana menyebabkan rendahnya mobilitas kader dan efektivitas program-program Kampung KB.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan mengambil judul “Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam studi lapangan, ada tiga instrument penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Kampung KB di Desa Dutohe

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam memulai kegiatan. Tanpa perencanaan yang baik, semua kegiatan akan berjalan dengan tidak beraturan.

Data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti diperoleh tentang pelaksanaan perencanaan implementasi kebijakan Program Kampung KB di desa Dutohe, pada umumnya masih butuh pembenahan dengan perlu melakukan perbaikan pada perencanaan program dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal, peningkatan sumber daya aparatur, dukungan anggaran, pengorientasian anggaran, serta kesejahteraan penyuluh.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan data hasil penelitian oleh peneliti diperoleh data tentang pelaksanaan pelayanan program Kampung KB di desa Dutohe, dapat dikatakan belum dilaksanakan dengan baik, untuk alur pelaksanaan pelayanan KB itu sendiri menurut informan masyarakat masih kurang dipahami, tidak semua masyarakat dapat memahami mengenai standar pelayanan yang telah dibuat.

Koordinasi dalam pelayanan program kampung KB di desa dutohe pun menjadi sangat dibutuhkan, berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dalam tataran koordinasi dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan baik. Hasil pengamatan dan penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi hanya dominan dengan dinas kesehatan saja, sehingga kurangnya keseimbangan dengan dinas lainnya.

3. Monitoring dan Evaluasi

Pengawasan/monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi program, kebijakan yang dikembangkan dalam pelayanan saat itu, serta merumuskan, merekomendasikan kebijakan, dan memungkinkan peningkatan kinerja pemerintah kecamatan. Berdasarkan data dari hasil penelitian diperoleh data tentang pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan pelayanan Program Kampung KB pada umumnya telah memenuhi kriteria dan dapat dikatakan dilakukan dengan baik

karena monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kampung KB ini dilaksanakan secara rutin.

Faktor-faktor yang Menentukan Implementasi Kebijakan Program Kampung KB di Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.

1. Kepatuhan Aparatur

Berkaitan dengan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan ini merujuk apakah implementor patuh terhadap prosedur dan standar aturan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Kampung KB di Desa Dutohe sudah sesuai dengan pedoman yang ada. Menurut hasil observasi penulis di Desa Dutohe telah melaksanakan kebijakan program kampung KB dengan baik, hal ini mereka lakukan dengan pemberian layanan yang baik, transparansi dan akuntabilitas. Mengenai kerangka kerja berdasarkan pedoman pengelolaan kampung KB, penulis mengamati bahwa kampung KB Desa Dutohe sudah dilaksanakan sesuai dengan kerangka kerja yang menjelaskan tupoksi masing-masing pihak khususnya peran-peran pihak dalam lini lapangan.

2. Kelancaran Rutinitas Dan Tiadanya Persoalan

Tercapainya sebuah implementasi kebijakan ditunjuk dengan adanya kelancaran rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang

dihadapi. Dalam organisasi rutinitas fungsi sangat berperan untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan kampung KB di Desa Dutohe bahwa partisipasi masyarakat dalam ikut program sudah cukup baik, namun adapun permasalahan yang menjadi kendala dalam kegiatan program ini adalah dukungan anggaran. Sarana prasarana kampung KB yang belum kurang memadai, tidak adanya rumah data, kesekretariatan KKB sehingga belum adanya mekanisme operasional seperti rapat perencanaan kegiatan.

3. Kinerja Dan Dampak Yang Dikehendaki

Tercapainya atau berhasil tidaknya dari suatu implementasi kebijakan mengacu dan mengarah pada kinerja dan dampak atau manfaat yang dikehendaki dari keseluruhan kebijakan yang ada. Sesuai dengan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa realisasi tujuan dalam pelaksanaan program Kampung KB di desa Dutohe Kecamatan kabila sejauh ini kemajuan/perubahannya tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukan bahwa Program program kampung KB sepertinya belum berjalan secara optimal sesuai dengan yang dikehendaki.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang merupakan pembahasan data yang diperoleh dilapangan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Implementasi kebijakan Program Kampung KB di desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Secara umum pelaksanaan program KB telah memenuhi kriteria dan dapat dilakukan dengan baik karena monev telah dilaksanakan secara rutin. Hanya saja masih ada beberapa kendala seperti kurang memadainya sarana dan prasarana, serta kualitas SDM penyuluh maupun kader kampung KB yang perlu di tingkatkan dan diperbaiki.
2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Program Kampung KB di desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Dalam pelaksanaan program kampung KB kepatuhan terhadap aturan/pedoman telah dilaksanakan dengan baik oleh implementor dan penyuluh KB, tetapi untuk dampak dari program kampung KB sendiri belum terlihat perubahan besar dari program ini.

REFERENSI

- Dunn, William N. 2014. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Kadji, Yulianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Dalam Perspektif Realitas*. Cahaya Abadi: Tulung Agung Jawa Timur.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafri, W. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jatinagor: Erlangga.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tahir, Arifin 2020. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jurnal:
- Handi Rifian, dkk. 2020. *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume 16, No. 1.
- Istiadi, Arizqa. 2017. *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Pada Kelompok Sasaran Keluarga Dengan Remaja di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk*. Jurnal mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Volume 5, No. 4.
- Purwaningsih S, S. 2012. *Desentralisasi Program Keluarga Berencana: Tantangan dan Persoalan Kasus Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Kependudukan Indonesia. VII (2), 113.
- Rahman HM, Junaidi Indrawadi. 2019. *Implementasi Program Kampung KB dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang*. Journal of Civic Education. Volume 2, No. 4.
- Yulian Widya Saputra, dkk. 2019. *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kota Samarinda*. Jurnal Georafflesia. Volume 4, No. 2.

Sumber Lain

- Badan Pusat Statistik. 2020. *Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2020*. Di akses pada 15 Mei 2021.

Badan Pusat Statistik. 2020. *Sensus Penduduk Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020*. Di akses pada 15 Mei 2021.

<http://kampungkb.bkkbn.go.id>, diakses pada 15 Mei 2021.

